

MONITORING & EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu
Kalimantan Barat, 78716, Telepon (0567) 21003
Faksimile (0567) 21397
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>
Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

NOTULEN RAPAT**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Rapat : Monitoring & Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024
Hari/Tanggal : Selasa, 4 Februari 2025
Surat Undangan : 900/334/SETDA/PERKEU Tanggal 23 Januari 2025
Waktu Rapat : 09:45 WIB – 10:30
Acara : Monitoring & Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024
Pimpinan Rapat : Drs. H. Mohd. Zaini, M.M.
Ketua : Ir. Istiwa, M.Si
Sekretaris : Teodolus Teddy Hinggaan, S.T.
Pencatat : Adrianus Irwantoto, S.IP
Peserta Rapat : Daftar Terlampir

Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pengantar singkat dari Sekretaris Daerah terhadap capaian dan realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan bagian-bagian sampai dengan Triwulan IV, selanjutnya para Kepala Bagian memaparkan pencapaian dan realisasi program/kegiatan serta kendala yang dihadapi sampai dengan akhir Triwulan IV.

1. Penyampaian Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan menyampaikan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan IV seperti dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	Predikat	B	87,50	98,22	-5,86
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	3,3	Nilai	2,671	80,93		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	80,8	Nilai	88	108,64		

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan, apabila melihat dari tabel yang berwarna kuning menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tidak efektif dan tidak efisien. Terdapat beberapa capaian kinerja yang capaiannya masih dibawah 90% sementara serapan anggaran secara keseluruhan itu tinggi bahkan hampir 100% terserap. Artinya apa, ini berarti bahwa kita sangat tidak efektif dan tidak efisien. Capaian kinerja tidak tercapai dan terjadi pemborosan anggaran yang begitu banyak. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama untuk kedepannya.

A. Predikat SAKIP

Berkaitan dengan nilai SAKIP Sekretaris Daerah berharap agar memaksimalkan kinerja dalam peningkatan nilai SAKIP. Tentunya perlu dukungan dari bagian-bagian dan Kerjasama tim bukan hanya tugas dari bagian Perencanaan/program atau tugas dari Bagian Organisasi saja melainkan tugas dari kita semua. Sekretariat Daerah merupakan Pembina dari seluruh OPD yang ada namun apabila dilihat dari nilai, masih sangat rendah dari OPD lain. Artinya perlu keseriusan kita dalam penanganan masalah ini. Sekretaris Daerah berharap kedepannya capain untuk SAKIP kalau bisa diatas 90% atau di Nilai BB sampai meraih nilai A.

Rekomendasi dari inspektorat mengenai hasil evaluasi SAKIP diharapkan menjadi bahan pertimbangan yang sangat serius.

B. LPPD

Nilai LPPD sampai saat ini belum ada nilai yang dikeluarkan dari Kementrian Dalam Negeri, nilai yang ada saat ini di ambil dari nilai tahun 2022. Saya rasa apabila sudah dikeluarkan tentu capaian ini tidak seperti ini. Memang hampir di seluruh Indonesia beberapa Sekretariat Daerah nya yang juga menggunakan IKU ini tentu akhirnya capaiannya menjadi sangat rendah. Ini memang bukan secara murni kesalahan kita. Tapi akibat dari hal ini menjadikan kita seolah tidak efisien dalam pengelolaan anggaran padahal kita sudah bekerja secara optimal saya rasa dalam peningkatan nilai LPPD ini.

C. IKM

Untuk IKM saya rasa tidak masalah karena cpaianya sudah melebihi target sebesar 8% nanti kalau bisa di Tahun 2025 disesuaikan target ini dengan capaian pada Tahun 2024.

2. Penyampaian Asisten Administrasi dan Umum

Berikut adalah capaian kinerja dari Asisten Administrasi dan Umum:

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01.01	Meningkatnya kebijakan strategis di bidang administrasi umum	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00	98,52	1,48
		Jumlah Kebijakan bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	12	Bulan				
		Jumlah Kebijakan administrasi umum yang direncanakan menjadi produk hukum	12	Bulan				

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Selanjutnya Asisten Administrasi dan Umum memaparkan, bahwa indikator kinerja ini sepertinya tidak sesuai dengan formulasi perhitungannya. Jika menggunakan target bulanan inikan tentu akan selalu 12 bulan atau 3 bulan untuk setiap triwulannya. Ini juga menjadi bahan perhatian kita agar kedepannya penyusunan Renja agar diperhitungkan betul formulasi perhitungannya. Mungkin nanti dapat melihat formulasi perhitungan di daerah lain. Asisten Administrasi dan umum menghimbau, agar bagian Perencanaan dan Keuangan menyiapkan data yang diperlukan karna sebentar lagi kita akan melakukan penyusunan Renstra baru. Carikan nanti kira-kira indikator yang mencakupi dibawah saya. Namun demikian sepertinya hampir daerah lain pun mengalami masalah khusus untuk umum. Sama halnya dengan bagian umum yang terkadang sebagai penunjang hanya disebut formalitas.

3. Paparan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Berikut capaiannya khusus Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01.02	Meningkatnya kebijakan Strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	%	103,64	103,64	97,91	5,73
		Jumlah Kebijakan dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	522	Peraturan				
		Jumlah Rumusan kebijakan pada Bagian Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan menjadi produk hukum	522	Peraturan				

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Berdasarkan data diatas bahwa capaian dan Tingkat efisiensi sudah mencapai 5,73 ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun saya merasa bahwa formulasi perhitungan ini masih belum mengakomodir untuk 2 (dua) bagian lagi dibawah saya, sama halnya dengan Asisten Administrasi dan Umum tadi diatas. Jika kita berbicara untuk produk hukum saja ini berarti hanya bagian Hukum saja kan yang berkontribusi. Karena nampaknya agak kurang tepat apabila tusi di bagian Pemerintahan dan kesra itu menangani masalah produk hukum. Tetapi tidak apalah, kita kan baru memulai nanti kita coba diskusikan bersama bagaimana yang terbaiknya.

4. Paparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Coba kita lihat capain kinerja di bagian saya:

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01.03	Meningkatnya fasilitasi penerapan kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00	99,06	0,94
		Jumlah rumusan Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	6	Peraturan				
		Jumlah Rumusan Kebijakan Strategis	6	Peraturan				
		Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00		
		Jumlah rumusan kebijakan strategis dibidang pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	15	Peraturan				
		Jumlah rumusan kebijakan strategis yang direncanakan menjadi produk hukum	15	Peraturan				
	Meningkatnya kualitas pemanfaatan kebijakan sumber daya alam	Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna	100	%	100	100,00		
		Jumlah Kebijakan dibidang sumber daya alam yang tepat guna	2	Kebijakan				
		Jumlah Kebijakan sumber Daya alam yang dievaluasi	2	Kebijakan				

Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100	%	100	100,00		
	Jumlah rumusan Kebijakan strategis dibidang barang dan jasa yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum Daerah	1	Peraturan				
	Jumlah rumusan Kebijakan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa	1	Peraturan				

 Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan, bahwa sama seperti dua asisten tadi sebelumnya bahwa indikator nya sudah bagus, tetapi kenapa lalu untuk perhitungannya mengenai produk hukum sementara di ekbang itu mengurus masalah perekonomian Pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Tentu ini menurut saya seperti ini tidak nyambung. Jadi yang untuk di saya ini nanti juga menjadi pertimbangan untuk dijadikan yang sesuai dengan tiga bagian yang saya bawa ini.

5. Paparan dari Kepala Bagian Umum

Dari hasil yang telah dihimpun oleh kawan-kawan di Bagian Umum yang sudah di entri pada sistem yang telah dibuat oleh bagian Perencanaan pada Link: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> maka dapat kami sampaikan capaian kinerja kami pada Bagian Umum seperti pada tabel:

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	%	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01.01.2.03	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan1	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	%	100	105,26	98,85	6,41
		Jumlah Barang Milik Daerah yang sudah teradministrasi dengan baik	5	Barang				
		Jumlah Barang Milik Daerah	5	Jenis				
4.01.01.2.03.0001	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	100,00	99,82	0,18
4.01.01.2.03.0002	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	100,00	99,93	0,07
4.01.01.2.03.0003	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1	100,00	99,43	0,57
4.01.01.2.03.0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100,00	99,96	0,04
4.01.01.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100,00	98,48	1,52
4.01.01.2.05	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan2	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	90	%	99,35	110,39	98,54	11,85
		Jumlah Administrasi Kepegawaian	230	Pegawai	256			
		Jumlah Pegawai	255	Pegawai	255			
4.01.01.2.05.0001	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Bulan	12	100,00	100,00	0,00

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	%	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01.01.2.05.0002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	100,00	100,00	0,00
4.01.01.2.05.0003	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	Bulan	12	100,00	98,60	1,40
4.01.01.2.05.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Siste	12	Bulan	12	100,00	98,74	1,26
4.01.01.2.05.0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	12	Bulan	12	100,00	99,65	0,35
4.01.01.2.05.0009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	10	100,00	94,49	5,51
4.01.01.2.06	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan3	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	%	100,00	100,00	99,62	0,38
		Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi	23447	Administrasi	23447			
		Jumlah Administrasi Umum	23447	Administrasi	23447			
4.01.01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1,00	100,00	99,85	0,15
4.01.01.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	Paket	1,00	100,00	93,97	6,03
4.01.01.2.06.0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1,00	100,00	99,64	0,36
4.01.01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1,30	129,99	99,99	30,00
4.01.01.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1,13	113,46	94,46	19,00
4.01.01.2.06.0008	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	Laporan	30	100,00	99,99	0,01
4.01.01.2.06.0009	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1500	Laporan	1500	100,00	99,99	0,01
4.01.01.2.06.0010	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	1	100,00	99,96	0,04
4.01.01.2.07	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan4	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	%	100,00	100,00	99,99	0,01
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	651	Barang	651			
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	651	Barang	651			
4.01.01.2.07.0002	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	100,00	100,00	0,00
4.01.01.2.07.0005	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	650	100,00	99,86	0,14
4.01.01.2.08	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan5	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	100,00	100,00	97,11	2,89
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5083	Laporan	5083			
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5083	Laporan	5083			
4.01.01.2.08.0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	Lap	5053	100,00	100,00	0,00
4.01.01.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	100,00	96,93	3,07

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	%	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01.01.2.08.0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	6	100,00	95,63	4,37
4.01.01.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	100,00	99,94	0,06
4.01.01.2.09	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan⁶	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	100	100,00	97,20	2,80
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	47	Unit				
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5083	Laporan				
4.01.01.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	34	100,00	94,86	5,14
4.01.01.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	11	100,00	99,82	0,18
4.01.01.2.09.0009	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	100,00	98,75	1,25
4.01.01.2.11	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan⁷	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100	%	100	100,00	85,71	14,29
		Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH yang terpenuhi	12	Plyn				
		Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KD dan WKDH yang direncanakan	12	Plyn				
4.01.01.2.11.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang/Bulan	24	100,00	77,39	22,61
4.01.01.2.11.0003	Terlaksananya kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	Orang	0	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.0004	Tersedianya Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	2	100,00	99,99	0,01

 Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Pada Bagian Umum secara keseluruhan apabila telah dilihat dari tabel tersebut bahwa tingkat efisiensinya sudah sangat bagus yang berarti target kinerja sudah tercapai dan balance juga dengan serapan anggarannya. Namun ini semua tidak terlepas dari kerja keras kita semua seluruh Tim SAKIP bentuk koordinasi yang baik kami juga dari Bagian Perencanaan dan Bagian organisasi ketika mengalami masalah yang akhirnya bisa kami atasi sehingga capaian ini bisa menjadi sangat baik. Memang dari awal penetapan rencana kerja banyak sekali masalah capaian kinerja yang tidak tercapai pada triwulan sebelumnya. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara tim untuk melakukan revisi terhadap beberapa target kinerja yang ditandai dengan warna kuning yang mengalami perubahan. Itu awalnya pak Sekda merah semua capaiannya sehingga perlu kami diskusikan kebagian Perencanaan.

Terkait capaian kinerja yang rendah itu terdapat pada indikator *medical check up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan capaian 0%. Para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak melakukan *medical check up* menggunakan anggaran yang ada pada Sekretariat daerah melainkan menggunakan anggaran dari partai/ secara mandiri.

6. Paparan dari Kepala Bagian Organisasi

Dari hasil yang telah diinput oleh admin pada bagian Organisasi maka dapat dilihat capaian kinerja pada Bagian Organisasi seperti pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator	Target	Sat	Relaisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi melalui Penilaian Mandiri	15	PD	15	100,00	99,56	2,66
		Jumlah Analisis Jabatan Perangkat Daerah yang tepat fungsi	5	Anjab	5	100,00		
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	7	PD	7	100,00		
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6	PD	6	100,00		
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	18	PD	20	111,11		
2	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan pengelolaan kelembagaan	22	PD	22	100,00	99,34	0,66
		Jumlah PD yang dilakukan pendampingan anjab	5	PD	5	100,00		
3	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Ketatalaksanaan	50	PD	50	100,00	99,69	0,31
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Pendampingan	7	PD	7	100,00		
4	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan SAKIP	50	PD	50	100,00	99,66	0,34
		Jumlah PD yang terlibat dalam Pelaksanaan RB sebagai Leading Sector	6	PD	6	100,00		

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Dari table tersebut capaian sudah tercapai semua 100% persen dengan Tingkat efisiensi rasio diatas 0. Namun apabila capaian ini dibandingkan dengan target pada Akhir Renstra maka mengalami kelebihan capaian kinerja yang sangat signifikan. Hal ini terjadi terdapat beberapa perubahan aturan dari Kementerian mengenai beberapa OPD yang dilakukan pendampingan. Namun pada bagian organisasi juga terdapat beberapa perbaikan baik itu indikator dan target. Jumlah Anjab PD yang tepat fungsi semula ditargetkan 6 (enam) anjab namun dilakukan perbaikan ditargetkan sebanyak 5 (lima) anjab. Terdapat pula beberapa indikator yang berubah hal ini terkait aturan tadi yang sudah saya sebutkan diatas.

7. Paparan dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Capaian pada bagian Prokopim di tampilkan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Sat	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	196	98,00	99,46	-1,37
	Meningkatnya Kualitas layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	230	Lyn	226	98,26		
	Meningkatnya layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	196	98,00		

2	Terlaksananya Fasilitas Keptokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keptokolan	1	Lap	1	100,00	99,05	0,95
3	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	Lap	1	100,00	99,94	0,06
4	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	Lap	1	100,00	99,92	0,08

 Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Dari tabel diatas bahwa capaian kinerja sudah mencapai diatas 95% namun apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran maka Tingkat efisiensi menjadi rendah. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti berikut:

- Kurangnya koordinasi dari panitia atau penyelenggara acara/kegiatan sehingga masih belum maksimal dalam memfasilitasi Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Perlu adanya Surat Edaran yang disebarakan kepada OPD terkait hingga pada level Pemerintah Desa mengenai Tata Cara Fasilitas Keptokolan yang ada dilanjutkan dengan sosialisasi kepada OPD serta pihak terkait yang akan mengadakan kegiatan maupun acara agar kegiatan yang terlaksana sesuai dengan pedoman Keptokolan yang ada;
- Terdapat lokasi-lokasi yang sulit terjangkau baik secara langsung (jalan yang terlalu jauh/terisolasi) ataupun daring (blankspot/tanpa sinyal) sehingga himbauan/informasi kegiatan/acara/ucapan dari Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah tidak terfasilitasi secara maksimal,serta perlunya meningkatkan kerjasama media-media yang ada baik elektronik,cetak,online,radio yang ada di lingkup Kabupaten Kapuas Hulu. memberikan ucapan atau pemberitahuan yang bersifat fisik dan disebarluaskan hingga ke seluruh lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk menyebarluaskan kegiatan,baik melalui fisik,media online,media cetak, media elektronik serta radio maupun media media lain untuk membantu penyebarluasan informasi agar terfasilitasi komunikasi pimpinan secara efektif dan efisien.
- terdapat kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada lokasi yang minim pencahayaan sehingga sulit meliput/mengambil foto kegiatan serta adanya kerusakan pada sarana prasarana Fotografi dan adanya gangguan malware/virus yang mengganggu penyimpanan arsip Foto dalam bentuk digital, dan kurangnya gudang penyimpanan yang dapat menyimpan arsip dokumentasi/foto secara fisik. Perlu adanya Backup data yang memadai untuk menyimpan seluruh arsip Foto yang ada dan perlu di cek secara berkala komputer atau memori agar tidak terkena virus atau malware yang dapat membahayakan arsip digital tersebut dan perlu adanya antivirus yang kuat dalam menjaga sarana dan prasarana kantor yang menjadi penyimpanan arsip digital tersebut;
- Kurangnya ASN yang menginput kegiatan setiap harinya,sehingga terhambatnya proses penginputan laporan sehingga dipandang perlu untuk menambah personal ASN baru.

8. Bagian Tata Pemerintahan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan menyampaikan, sangat terbantu sekali dengan sistem kerja yang saat ini telah diberlakukan serta koordinasi yang begitu intensif ini sangat luar biasa sehingga banyak selama ini masalah dalam perSAKIPan yang membingungkan menjadi bisa diselesaikan bersama. Berdasarkan data yang telah kami olah dan catat tentang kinerja, maka kami sampaikan capaian kinerja seperti dibawah ini:

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	62	%	54	86,44	99,67	5,35
		Jumlah administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang terselesaikan	207	Adm				

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
		Jumlah batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	334	Adm	87	117,51		
		Persentase Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	74	%				
		Jumlah data Rupa bumi kecamatan yang dimutakhirkan	17	Laporan				
		Jumlah data Rupa Bumi Kecamatan	23	Laporan				
	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten	Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	90	%	100	111,11		
		Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	24	OPD				
		Jumlah OPD Menyusun LPPD	27	OPD				
2	Terfasilitasinya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	Dok	2	100,00	99,76	0,24
3	Terfasilitasinya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	1	100,00	99,65	0,35
4	Terfasilitasinya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Dok	1	100,00	99,62	0,38
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	90	%	91,30	101,45	99,65	1,80
		Jumlah Kerjasama yang disetujui	21	Kerjsma				
		Jumlah Kerjasama yang direncanakan	23	Kerjsma				
6	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama DalamNegeri	21	Dok	21	100,00	99,65	0,35

 Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Dari hasil capaian diatas terlihat capaian rata-rata baik dengan Tingkat capaian diatas 85% namun bagi kami ini tetap menjadi bahan evaluasi untuk kami agar tetap meningkatkan kinerja sesuai target. Terdapat capaian kinerja dibawah 95% yaitu indikator persentase penyelesaian batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Semula target ini sebesar 77% sehingga capaiannya sangat rendah, oleh sebab itu maka dengan hasil diskusi bersama tim SAKIP kita akhirnya dilakukan perubahan target terhadap indikator tersebut sehingga akhirnya capaian sudah mencapai 86,44%. Permasalahan ini disebabkan beberapa factor:

- Tim batas Desa dan Camat sulit membangun kesepakatan Batas Desa, hingga proses pentapan dan penegasan batas desa.
- Masih terdapat pemahaman masyarakat yang keliru terkait batas desa dapat menghilangkan hak kepemilikan tanah masyarakat desa dan perbedaan kepentingan, baik kepentingan, baik kepentingan sosial dan ekonomi.
- Tim batas Desa dan Camat sulit membangun Kesepakatan Batas Desa, Sehingga proses penetapan dan penegasan batas desa masih terdapat pemahaman masyarakat yang keliru terkait batas desa dapat menghilangkan hak kepemilikan tanah masyarakat desa dan perbedaan kepentingan, baik kepentingan sosial dan ekonomi.

Terkait masalah tesebut diatas maka perlu melakukan koordinasi, konsultasi serta melakukan sosialisasi dan pembinaan serta melakukan perbaikan terhadap target kinerja tersebut.

Selain dari indikator diatas terdapat pula permasalahan pada beberapa indikator yang lain:

- Jumlah data Rupa bumi kecamatan yang dimutakhirkan beberapa masih belum dilakukan pemutakhiran sehingga dari 23 kecamatan hanya 5 kecamatan yang telah dimutakhirkan sehingga capaian sangat rendah dengan capaian 29,38%. Pemutakhiran data rupa bumi tersebut menunggu pemutakhiran aplikasi yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk selanjutnya dapat dilakukan verifikasi.
- Kerjasama Daerah semula hanya menangani MoU namun dengan telah terbitnya permendagri yang terbaru maka LSM yang semula ditangani oleh OPD kini ditangani oleh Bagian Pemerintahan. Hal ini lah yang menyebabkan capaian kinerja ini melebihi

target dengan capaian 434,78%. Adapun Upaya yang telah kami lakukan yaitu melakukan perubahan target kinerja pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan.

9. Paparan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan, bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat sudah berupaya melakukan peningkatan kinerja yang diharapkan sehingga capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Sat	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	%	100,00	100,00	97,92	2,08
		Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	17	SK				
		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Rakyat	17	SK				
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100	%	100,00	100,00		
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	4	Keg				
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang direncanakan	4	Keg				
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	100	%	100,00	100,00		
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	6	Keg				
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat yang direncanakan	6	Keg				
2	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	325	Dok	325	100,00	97,89	2,11
3	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	101	dok	101	100,00	99,69	0,31
4	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	2	Dok	2	100,00	99,87	0,13

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Capaian kinerja pada bagian Kesejahteraan Rakyat hampir bisa dikatakan sudah mencapai 100% semua namun demikian masih tetap ada beberapa catatan kami mengenai beberapa target yang mengalami perubahan serta Tingkat kemajuan dari target akhir Renstra yang sudah sangat signifikan melebihi target diuraikan sebagai berikut:

- Terdapat dua indikator yang capaiannya terhadap target akhir Renstra telah melebihi yaitu indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual dan kegiatan Evaluasi. Pada dokumen Renstra Target akhir Renstra hanya menargetkan sebanyak 5 Dokumen saja namun setelah berjalan waktu telah terealisasi sebanyak hampir 400 dokumen sehingga hal ini lah yang menyebabkan tingginya tingkat kemajuan capaian pada Renstra. Menanggapi hal tersebut maka perlu dilakukan perbaikan terhadap target pada dokumen Renstra kita.
- prosedur yang dirancang agar lebih terarah dan terukur sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi agar kinerja bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
- sering terjadi perubahan kebijakan sehingga perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi ke pemberi kebijakan
- Belum terevaluasi semuanya kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial maka semua kegiatan harus terevaluasi agar terarah dan lebih efektif
- kurang teliti ASN dalam seleksi dokumen sehingga perlu adanya ketelitian ASN dan koordinasi tentang penerimaa dokumen;
- kurangnya kebijakan terkait kesejahteraan sosial hanya pemberdayaan Masyarakat sehingga perlu adanya peningkatan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial dll;
- kurangnya koordinasi dan sinkronisasi ASN sehingga perlu peningkatan koordinasi ASN disetiap kebijakan.

10. Paparan Kepala Bagian Hukum

Berikut capaian kinerja pada bagian Hukum:

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kebutuhan Masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan yang harmonis	70	%	67,30	96,15	96,26	-11,45
		Jumlah kebijakan yang harmonis	46	Peraturan				
		Jumlah Kebijakan yang dibuat	66	Peraturan				
		Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	90	%	82,13	91,25		
		Jumlah produk hukum yang selesai disusun	720	Peraturan				
		Jumlah produk hukum yang di rancang	800	Peraturan				
		Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	90	%	86,67	96,30		
		Jumlah fasilitas bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah	14	Fasilitas				
		Jumlah fasilitas bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi yang direncanakan pada Pemerintah Daerah	15	Fasilitas				
		Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	90	%	50	55,56		
		Jumlah kegiatan publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	36	Keg.				
		Jumlah kegiatan publikasi dan penyebarluasan Peraturan	40	Keg.				

		Perundang-Undangan Yang seharusnya dilaksanakan						
2	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800	Dok	618	77,25	94,98	-17,73
3	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	10	Kasus	10	100,00	97,19	2,81
4	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	19	Dok	21	110,53	97,96	12,56

 Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Dari paparan tersebut dapat dilihat bahwa pada bagian hukum terjadi ketidakefisiensian dalam penggunaan anggaran untuk mewujudkan target kinerja. Hal ini disebabkan terdapat dua indikator yang tidak mencapai target atau dibawah 85% diuraikan sebagai berikut:

- Persentase Publikasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan ditargetkan sebesar 90% dengan target jumlah kegiatan yang dipublikasikan sebesar 36 kegiatan. Dengan target tersebut telah terealisasi kegiatan publikasi dan penyebarluasan sebanyak 20 kegiatan saja dengan capaian kinerja hanya mencapai 55,56% saja. Hal ini disebabkan karena tidak kesesuaian antara target dan realisasi kinerja sementara yang dilakukan penyebarluasan hanya perda dan perbub saja. Sehingga kami rasa target ini terlalu besar dan perlu melakukan penyesuaian terhadap target kinerja.
- Jumlah produk hukum daerah yang disusun ditargetkan sebanyak 800 dokumen dan telah terealisasi hanya sebanyak 618 dokumen saja dengan capaian kinerja hanya mencapai 77,25%. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan produk hukum yang dibuat. Berdasarkan hasil Rakor pada Tingkat Provinsi bahwa mengharapkan penyusunan produk hukum dilakukan apabila sangat efektif untuk dilakukan. Dengan artian bahwa apabila suatu produk hukum tidak efektif untuk dilaksanakan sebaiknya tidak perlu Menyusun suatu produk hukum sehingga perlu melakukan penyederhanaan produk hukum. Permasalahan lain begitu banyaknya OPD yang belum menyelesaikan produk hukumnya sampai dengan saat ini. Telah banyak koreksi yang telah dilakukan dan penyampaian hasil setelah dikoreksi sampai saat ini masih banyak yang belum disampaikan kembali. Jadi sudah dapat kami pastikan bahwa jumlah realisasi akan terus bertambah bahkan dapat bertambah sampai dengan pertengahan tahun ini. Ini menjadi suatu Pelajaran juga untuk kami bahwa dalam penetapan target kinerja harus memperkirakan target yang sesuai serta memilih produk hukum yang akan dilakukan.

11. Paparan Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA

Berikut kami tampilkan hasil capaian kinerja kami pada Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA:

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	%	100	100,00	99,99	0,01
		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian	6	Kebijakan				
		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	6	Kebijakan				
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	4	100,00	100,00	0,00
2	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Dok	4	100,00	99,99	0,01
3	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	Dok	1	100,00	99,94	0,06
4	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	1	100,00	99,96	0,04
5	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	Dok	2	100,00	100,00	0,00

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
6	Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	%	100,00	100,00	99,65	0,35
		Jumlah rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan	15	Kebijakan				
		Jumlah rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	15	Kebijakan				
7	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dok	4	100,00	99,63	0,37
8	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Lap	4	100,00	99,85	0,15
9	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Dok	100	100,00	99,54	0,46
10	Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	%	100	100,00	99,96	0,04
		Jumlah rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam	15	Kebijakan				
		Jumlah rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	15	Kebijakan				
11	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dok	4	100,00	99,93	0,07
12	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	Dok	2	100,00	99,94	0,06
13	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	Dok	2	100,00	100,00	0,00

 Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA sudah sangat memadai dengan Tingkat efisiensi diatas rasio 0 dan dapat dikatakan bahwa bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA sudah berhasil menyelenggarakan tugas dan fungsinya namun perlu kami sampaikan pula bahwa pencapaian tersebut tentu mengalami beberapa masalah yang kami alami seperti diuraikan berikut ini:

- Proses perizinan pertambangan rakyat yang difasilitasi merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui sistem OSS. IPR yang difasilitasi sudah masuk dalam sistem OSS, Pemerintah Provinsi sedang dalam tahap verifikasi dan validasi semua persyaratan. Maka dari itu kami sedang menunggu proses di Pemerintah Provinsi Kalbar.
- Sering terlambatnya data dari BUMD dan BLUD yang dilaporkan ke Bagian EKbang SDA Setda Kab. KH. Sehingga kami harus sering berkomunikasi dan konsultasi ke BUMD serta dibuat surat untuk penyampaian laporan ke BUMD tersebut.
- Jumlah pengendalian dan distribusi perekonomian sering terjadinya keterlambatan data dari wilayah sample sehingga kami harus terus berkoordinasi dengan Kepala Pimpinan Kecamatan Sample terkait kesiapan data.
- Belum terlaksananya persiapan data UMKM sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan oleh karenanya perlu berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan UMKM;
- Kurangnya SDM seperti dokter spesialis di RS Kab. KH sehingga perlu melakukan koordinasi serta Study Banding ke RSUD Soedarso Pontianak yang sudah melaksanakan BLUD;

12. Paparan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Berikut ini adalah capaian kinerja pada Bagian Pengadaan barang dan jasa:

No	Sasaran	Indikator	Target	Sat	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif dan Efisien	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	80	%	100	125,00	98,67	7,58
		Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilihan tender seleksi dan e-purchasing diproses UKPBJ)	59	Paket				
		Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilihan tender seleksi dan e-purchasing diusulkan kepada UKPBJ)	74	Paket				
		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	50	OPD	50	100,00		
		Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	20	Plk Ush	20	100,00		
			50	OPD	50	100,00		
2	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	525	Dok	544	103,62	98,52	5,10
3	Terkelolanya Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	78	Dok	78	100,00	98,57	1,43
4	Terlaksananya Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	Org	60	100,00	99,10	0,90

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Berdasarkan dari tabel diatas bahwa dapat dikatakan bahwa seluruh target kinerja yang ada pada bagian PBJ semuanya telah mencapai target. Namun terdapat pula kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini namun tetap dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga terwujudnya layanan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien. Adapun beberapa permasalahan yang kami maksud adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Jumlah usulan tender pada tahun 2024, dikarenakan pergeseran anggaran, konsolidasi paket dan tender dini untuk paket pekerjaan tahun anggaran 2025;
- Meningkatnya Jumlah usulan tender pada tahun 2024, dikarenakan pergeseran anggaran dan konsolidasi paket. Untuk Triwulan ke IV dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa belum ada, karen paket tender dini, baru ada dokumen hasil pengadaan di bulan januari 2025.

13. Analisis Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka selanjutnya melakukan analisis permasalahan dan strategus pemecahan masalahnya dengan analisis SWOT sebagai berikut:

FAKTOR EKSTERNAL

RUMUSAN STRATEGI

1. Terdapat Perbup 54 tahun 2022
2. Terdapat Hasil Evaluasi SAKIP
3. Terdapat form penialain mandiri SAKIP
4. Adanya pihak Inkab dan Bagian Organisasi yang bisa di ajak berdiskusi
5. Banyak referenrensi belajar di internet

1. Melakukan penilaian Mandiri AKIP
2. Melibatkan seluruh tim SAKIP dalam penilaian mandiri

1. Berdiskusi dengan Inkab dan Bagian Organisasi
2. Melakukan perbaikan terhadap Pohon Kinerja dan Cascading kinerja
3. Buat surat 1 bulan sebelum pelaksanaan (Tr 1 buat Februari, Tr2 Mei, tr 3 Agustus, tr 4 November). Surat pengumpulan data kinerja juga dibuat sama seperti diatas. Batas pengumpulan data tr 1 14 April, tr 2 14 Juli, tr 3 14 Oktober, tr 4 14 Januari
4. Belajar secara mandiri dari internet
5. Jemput Bola data pada Bagian
6. Kumpulkan semua SKP

1. Perubahan aturan mengenai item penilaian SAKIP
2. LPPD target sudah tidak menggunakan nilai lagi
3. Teknologi yang berkembang pesat
4. Kesibukan/ padatnya jadwal pekerjaan

1. Updating mengenai aturan terbaru
2. Mempelajari secara mendalam terkait aturan baru.
3. Berdiskusi dengan seluruh tim tentang aturan terbaru
4. Beradaptasi cepat mengikuti teknologi
5. Menyusun jadwal pengukuran kinerja dan Monev Kinerja

1. Mengikuti Bintek/ Diklat SAKIP
2. Menggunakan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja
3. Melakukan perubahan target kinerja pada Renstra baru terkait LPPD

1. Melakukan penilaian Mandiri AKIP
2. Melibatkan seluruh tim SAKIP dalam penilaian mandiri
3. Berdiskusi dengan Inkab dan Bagian Organisasi
4. Melakukan perbaikan terhadap Pohon Kinerja dan Cascading kinerja
5. Buat surat 1 bulan sebelum pelaksanaan (Tr 1 buat Februari, Tr2 Mei, tr 3 Agustus, tr 4 November). Surat pengumpulan data kinerja juga dibuat sama seperti diatas. Batas pengumpulan data tr 1 14 April, tr 2 14 Juli, tr 3 14 Oktober, tr 4 14 Januari
6. Belajar secara mandiri dari internet
7. Jemput Bola data pada Bagian
8. Kumpulkan semua SKP
9. Updating mengenai aturan terbaru
10. Mempelajari secara mendalam terkait aturan baru.
11. Berdiskusi dengan seluruh tim tentang aturan terbaru
12. Beradaptasi cepat mengikuti teknologi
13. Menyusun jadwal pengukuran kinerja dan Monev Kinerja
14. Mengikuti Bimtek/ Diklat SAKIP
15. Menggunakan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja
16. Melakukan perubahan target kinerja pada Renstra baru terkait LPPD

- 1) Secara umum bahwa permasalahan ini tentu terkait permasalahan tentang sumber daya yang ada serta pemahaman kita tentang SAKIP ini seperti penentuan IKU yang tidak mewakili beberapa bagian atau asisten dibawah Sekretariat Daerah. Juga tadi permasalahan untuk setiap asisten yang juga tidak mencakupi seluruh bagian dibawahnya masing-masing. Namun kita semua berharap untuk tetap terus meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan terus belajar, berupaya, banyak informasi di internet yang bisa kita manfaatkan. Juga kita harus selalu berkoordinasi dan berkonsultasi secara aktif kepada yang lebih berpengalaman seperti kepada Bagian Organisasi yang sudah pasti banyak tau tentang dunia perSAKIPan. Bagian Perencanaan juga harus proaktif berkonsultasi ke bagian organisasi, bagian Perencanaan dan Keuangan juga harus menjemput bola, tanya ke bagian apa masalahnya. membantu bagian-bagian yang kurang paham, jika belum menemukan Solusi, agar berkoordinasi dengan atasan masing-masing di bagian.
- 2) Cara yang paling efektif dalam penentuan sasaran dan target kinerja adalah dengan membuat sebuah pohon kinerja, setelah membuat cascading selanjutnya pohon kinerja, kemudian menyusun IKU, IKI Renstra, Renja dan seterusnya. Saya lihat ini Renstra sudah terlebih dahulu ada, semetara pohon kinerja dan cascading belum ada. Sehingga renstra sudah jadi, malah jadi bingung membuat pohon kinerja. Kalau pohon kinerja dan cascading sudah ada, sudah tentu mudah membuat turunan kebawahnya.
- 3) Dalam penyusunan SAKIP memang harus benar-benar kompeten yaitu tadi harus minimal pernah mengikuti Bimtek SAKIP yang tentu diakui penyelenggaranya dan harus memiliki sertifikat. Ini tentu terkait masalah anggaran lagi. Belum lagi pemangkasan anggaran kita yang begitu besar-besaran. Tapi tentu komitmen saya tadi diawal bahwa belajar secara terus menerus itu saja yang bis akita manfaatkan jika memang bimtek sulit untuk kita lakukan.
- 4) Terkait LPPD ini problem juga sebenarnya. Kita sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan target dan indikator di LPPD, Sampai saat ini belum ada nilai yang dikeluarkan dari Kementrian Dalam Negeri, nilai ini di ambil dari nilai tahun 2022. Rendah capaian kita dan kita dianggap tidak efisien dalam penggunaan anggaran. Padahal kita sudah semaksimal mungkin untuk capai itu semua. Seperti yang dipaparkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan tadi bahwa nilai LPPD sekarang sudah tidak menggunakan angka lagi melainkan perdikat, Sehingga memang perlu kita lakukan perbaikan ini target khusus untuk LPPD. Salah satu yang dituntut dengan kita adalah kita sebagai ASN harus cepat beradaptasi terhadap seluruh perubahan jaman sekarang ini termasuk tadi perubahan terhadap peraturan dari setiap aturan yang ada. Banyak sistem informasi yang berubah-ubah dan memang kita dituntut untuk sigap terhadap perubahan itu agar kita tidak ketinggalan dengan pesatnya perkembangan teknologi.
- 5) Terkait ketidak efisienan dalam penggunaan anggaran tadi pada beberapa item kegiatan nanti akan lakukan penyesuaian anggaran. Jika memang dirasa perlu untuk melakukan pengurangan anggaran terhadap yang tidak efisien dalam penyerapan anggarannya. Karena yang kita inginkan adalah terwujudnya suatu target kinerja, bukan berapa persen serapan anggaran kita. Beda halnya dengan Kementerian Keuangan bahwa serapan anggaran harus 100% namun tidak halnya dengan Kinerja. Dalam kinerja ini efisien adalah yang terbaik yang berarti bahwa target kinerja terwujud 100% dengan biaya/ anggaran yang sedikit.
- 6) Jika memang beberapa indikator atau kegiatan yang benar-benar membutuhkan maka kita akan lakukan pergeseran anggaran tersebut terhadap kegiatan yang benar-benar memerlukan anggaran tersebut, seperti halnya tadi untuk Bimtek tim SAKIP.
- 7) Rapat Evaluasi ini disepakati wajib dilaksanakan setiap 3 bulan sekali agar cepat melakukan identifikasi permasalahan dan dibuatkan jadwalnya.
- 8) Harus ada sinkronisasi antara Bagian Perencanaan dan Keuangan dan bagian Organisasi sebagai Pembina OPD. Bagian Perencanaan melakukan jemput bola ke bagian dalam pengumpulan data.
- 9) Monitoring Kinerja secara rutin dilakukan setiap 3 Bulan sekali (Setiap Triwulan)

- 10) Kita sepakati bersama bahwa batas waktu pengisian Data Kinerja pada link: <https://bit.ly/Pengisian-Realisasi-Kinerja-SetdaKH> Paling Lambat setiap Tanggal 14 April, 14 Juli, 14 Oktober dan 14 Januari
- 11) Diminta kepada seluruh Bagian-Bagian agar membuat Dokumentasi Rapat Evaluasi level Bagian, setiap Triwulan dari Triwulan I s/d IV 2024. yang terdiri dari Surat Undangan, Notulen, Absensi dan Foto-foto.
- 12) Harap melakukan pengisian Form Perjanjian Kinerja 2025 pada Link: <https://bit.ly/Pengisian-Realisasi-Kinerja-SetdaKH-2025> paling lambat 31 Januari 2025.
- 13) Akan melakukan Rapat kembali seperti ini untuk melakukan [penilaian mandiri](#) AKIP Setda pada Tanggal **xx** Ferbruari 2025. Membentuk tim penilai.
- 14) Menyusun SKP yang selaras dengan PKnya (khusus Sekda, Asisten dan Kabag) dan pegawai/staf menyusun SKP yang selaras dengan SKP atasannya.

14. Matriks [Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2024](#).

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap SAKIP Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Nilai SAKIP yaitu B dengan berbagai rekomendasi perbaikan yaitu sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggungjawab	Status/ Progress Penyelesaian
1.	Melengkapi dokumen perencanaan dengan dokumen rencana aksi yang menjabarkan Renja dan Perjanjian Kinerja menjadi serangkaian tahapan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja;	Menyusun dokumen Rencana Aksi Kinerja Sekretariat Daerah	Tersedia dokumen Rencana Aksi Kinerja	Semua Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Sudah dilaksanakan
2.	Mempublikasikan dokumen renja sebelum akhir triwulan I tahun berkenaan;	Mempublikasikan Renja 2024 sebelum akhir triwulan I	Renja 2024 terpublikasi sebelum akhir triwulan I	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Sudah dipublikasi pada aplikasi PPID pada tgl 27 Februari 2024
3.	Memastikan kembali agar setiap pejabat yang menandatangani Perjanjian Kinerja menyusun SKP yang selaras dengan Perjanjian Kinerjanya dan setiap pegawai menyusun SKP yang selaras dengan SKP atasannya;	Menyusun SKP yang menyesuaikan dengan Perjanjian Kinerjanya dan memperhatikan keselarasan antar jenjang jabatan	SKP sudah disusun disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja dan selaras antar jenjang jabatan	Semua Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Dalam Proses
4.	Memastikan kembali agar setiap indikator kinerja individu (IKI) yang digunakan dilengkapi dengan definisi operasional dan mekanisme pengumpulan data (penentuan sumber data kinerja) yang jelas;	Membuat indikator kinerja individu (IKI) dilengkapi dengan definisi operasional dan mekanisme pengumpulan data yang jelas	Membuat SK Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Individu (IKI) Sekretariat Daerah	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Sudah dibuat dengan Keputusan Sekretaris Daerah No. 125/SETDA-PERKEU/2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggungjawab	Status/ Progress Penyelesaian
5.	Menyelenggarakan pengukuran kinerja setiap triwulan secara rutin dengan menggunakan data kinerja yang relevan;	Mengadakan pengukuran kinerja setiap triwulan tahun 2024	Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan tahun 2024	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Sudah dilaksanakan
6.	Memperbaiki penyajian laporan kinerja perangkat daerah periode selanjutnya sehingga laporan kinerja dapat memberikan informasi tentang namun tidak terbatas pada : • aksi-aksi konkret yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui berikut hasilnya; • memberikan penjelasan/penafsiran/interpretasi atas nilai efisiensi yang diperoleh.	Akan menyajikan aksi aksi konkret yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui berikut hasilnya dan memberikan penjelasan/penafsiran/in terpretasi atas nilai efisiensi yang diperoleh dalam Laporan Kinerja Tahun 2024		Kabag Perencanaan dan Keuangan	LKJip Belum dibuat
7.	Melaksanakan penilaian mandiri akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Kabag Perencanaan dan Keuangan	Sudah: Link
8.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi ini serta melaksanakan rencana tersebut				Sudah

15. Tindak Lanjut terhadap Hasil Evaluasi pada LKjIP 2023

Berikut ini adalah tabel permasalahan pada tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi	Status Progres
1	Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP	- Melakukan pendampingan terhadap bagian - Jemput Bola Data yang diperlukan - Melakukan rapat Monev setiap triwulan	- Sudah membentuk tim SAKIP dengan SK Sekda - Membuat Grup WA SAKIP - Penginputan data oleh masing-masing bagian melalui aplikasi spreadsheet - Rapat monev sudah pada hari ini	Selesai
2	Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah pada awal tahun	Menyusun Renaksi Kinerja pada Triwulan II	Renaksi sudah disusun: Link	Selesai
3	Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah	Reviu Renstra sebaiknya untuk Renstra baru saja	Penyusunan Draf Renstra Baru: - Link	Selesai

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi	Status Progres
	Kabupaten Kapuas Hulu secara berkala		- Link	
4	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran	Pengadaan Laptop untuk setiap staf pada Tim SAKIP Triwulan II	Sudah mendapat laptop semua	Selesai

16. Matriks Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan sebelumnya**1) Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III**

No	Permasalahan	Rencana Perbaikan	Realisasi	Status Progres
1	Masih rendahnya Nilai SAKIP	Melakukan Penilaian Mandiri	Sudah Melakukan Penilaian Mandiri: Link	Proses
2	Capaian terlalu rendah dan terlalu tinggi	Revisi Target Kinerja	Sudah Revisi Target Kinerja	Selesai
3	Rendahnya Capaian Bagian Umum	Menambah Staf PPPK	Menunjuk Yeti Rahayu	Selesai
4	Rendahnya Target pada Renstra	Penyusunan Draf Renstra baru	Proses Penyusunan Renstra Baru	Proses

*Sumber: Evaluasi Triwulan III 2024***2) Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan II**

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Realisasi	Status Progres
1	Terdapat Catatan hasil Evaluasi oleh Inspektorat terhadap SAKIP Setda	Membuat Rencana Aksi Tindaklanjuti perbaikan berdasarkan rekomendasi	Sudah membuat Matrik RATL: Link	Selesai
2	Rendahnya capaian SAKIP	- Melakukan Penilaian Mandiri AKIP	Proses: Link	Proses
3	Masih terdapat beberapa bagian yang belum mengisi/ menyampaikan kuesioner	- Mengingatkan kembali setiap bagian untuk menyampaikan segera kuesionernya	Sudah menyampaikan Kuesioner	Selesai
4	Perbaikan terhadap formulasi perhitungan untuk asisten	- Dimasukan nanti pada Renstra yang baru saja	Proses penyusunan Draf Renstra: Link	Proses
5	Terdapat Capaian yang melebihi/ kurang dari target	- Menyesuaikan target kinerja yang capaiannya terlalu tinggi	Sudah menyesuaikan target	Selesai
6	Terlambatnya data BLUD dan BUMD	- Melakukan koordinasi dan jemput bola data	Sudah terdapat data BLUD dan BUMD	Selesai

*Sumber: Evaluasi Triwulan II 2024***3) Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan I**


No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Realisasi	Status Progres
1	Kurangnya sumber daya dalam penanganan SAKIP	- Belajar secara mandiri dari internet - Berkoordinasi dan konsultasi secara aktif - Jemput bola data pada Bagian	Setiap bagian sudah proaktif dan bisa melakukan pengisian data kinerja melalui Link: https://bit.ly/Pengisian-Realisasi-Kinerja-SetdaKH	Selesai
2	Indikator pada Asisten/ Program tidak berhubungan dengan IKU	- Menyusun pohon kinerja - Menyusun cascading - Menyusun Renstra	Proses dalam penyusunan Renstra	Proses

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Realisasi	Status Progres
	Sekda dan tidak mengakomodir bawahannya	- Menyusun Formulasi Perhitungan sesuai indikator		
3	Tim penyusun SAKIP belum memiliki sertifikat Bimtek SAKIP	- Diklat/ Bimtek SAKIP	Tidak Terdapat Anggaran	Tidak Selesai
4	LPPD target sudah tidak menggunakan nilai lagi	- Melakukan perubahan target kinerja pada Renstra baru	Proses dalam penyusunan Renstra	Proses
5	Monitoring & Evaluasi terlambat atau tidak bisa dilakukan	- Wajib melakukan evaluasi setiap triwulannya - Buat surat 1 bulan sebelum pelaksanaan (Tr 1 buat Februari, Tr2 Mei, tr 3 Agustus, tr 4 November)	Sudah dilaksanakan	Selesai
6	SKP tidak selaras dengan PK	- Kumpulkan semua SKP - Memastikan Kembali bahwa PK sudah sesuai	Proses	Proses

Sumber: Evaluasi Triwulan II 2024

Demikian Rapat Evaluasi ini dilakukan dan telah disepakati bersama untuk segera ditindaklanjuti.

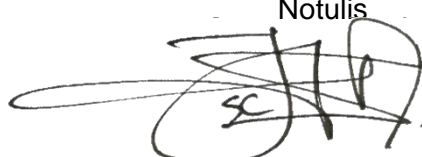
Pimpinan Rapat,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.

Putussibau, 04 Februari 2025

Notulis



ADRIANUS IRWANTOTO, S,IP

LAMPIRAN II SURAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR: 900/334/SETDA/PERKEU
 TANGGAL: 23 JANUARI 2026
 PERIHAL: RAPAT EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

MONITORING KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN IV TAHUN 2024

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Realisasi-Kinerja-SetdaKH>

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
4.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	redika	B	B	B	B	B	87,50	Ada	CC	A	77,78%	111.585.237.920	109.595.242.700	98,22	-5,86	SEKDA
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	3,3	Nilai	0	0	0	2,67	2,671	80,93	Ada	2,6708	3,8	70,28%					SEKDA
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	80,8	Nilai	0	0	0	88	88	108,64	Ada	83,84	81	108,37%					SEKDA
4.01.01	Meningkatnya kebijakan strategis di bidang administrasi umum	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	%	100	100	100	100	100	100,00	KEGIAT	100	100	100,00%	48.881.440.176	48.156.046.325	98,52	1,48	ASISTEN ADUM
		Jumlah Kebijakan bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	12	Bulan	3	3	3	3											
		Jumlah Kebijakan administrasi umum yang direncanakan menjadi produk hukum	12	Bulan	3	3	3	3											
4.01.01.2.01	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	%	76	65	65	162	91,89	91,89	Ada	100	100	91,89%	837.152.000	836.421.487	99,91	-8,02	PERKEU
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman teknis	37	Dok	7	6	6	15											PERKEU
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	37	Dok	9	9	9	9											PERKEU
1.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	0	1	0	1	2	100,00	Ada	2	10	40,00%	544.904.500	544.189.987	99,87	0,13	PERKEU
1.2.01.0002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok	0	0	1	0	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	43.164.500	43.164.500	100,00	0,00	PERKEU
1.2.01.0003	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dok	0	0	1	0	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	37.607.000	37.607.000	100,00	0,00	PERKEU
1.2.01.0004	Tersedianya Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	32.784.000	32.775.000	99,97	0,03	PERKEU
1.2.01.0005	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	27.938.000	27.938.000	100,00	0,00	PERKEU
1.2.01.0006	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Lap	1	0	0	4	5	100,00	Ada	4	25	36,00%	120.439.000	120.439.000	100,00	0,00	PERKEU
1.2.01.0007	Terlaksananya Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	Lap	0	0	0	1	1	25,00	Ada	1	5	40,00%	30.315.000	30.308.000	99,98	-74,98	PERKEU
4.01.01.2.02	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%	25	25	25	25	100,00	100,00	0	100	100	100,00%	14.225.084.000	13.936.718.130	97,97	2,03	PERKEU
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1	Dok	0	0	0	0											PERKEU
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	1	Dok	0	0	0	0											PERKEU

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.2.02.0001	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	3	3	3	3	12	100,00	Ada	12	60	40,00%	12.791.426.000	12.547.178.920	98,09	1,91	PERKEU
1.2.02.0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	0	1	5	40,00%	214.714.000	214.430.360	99,87	0,13	PERKEU
1.2.02.0003	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	0	1	5	40,00%	552.040.000	509.930.000	92,37	7,63	PERKEU
1.2.02.0004	Tersedianya Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	0	1	5	40,00%	45.333.000	45.329.000	99,99	0,01	PERKEU
1.2.02.0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	0	0	0	1	100,00	0	1	5	40,00%	55.527.000	55.527.000	100,00	0,00	PERKEU
1.2.02.0006	Tersedianya Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	Dok	0	1	0	0	1	100,00	0	1	5	40,00%	516.344.000	514.623.800	99,67	0,33	PERKEU
1.2.02.0007	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Lap	1	1	1	1	4	100,00	Ada	4	20	40,00%	37.862.000	37.862.000	100,00	0,00	PERKEU
1.2.02.0008	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	0	1	5	40,00%	11.838.000	11.837.050	99,99	0,01	PERKEU
1.01.01.2.03	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan1	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	%	80	0	240	80	100	105,26	Tidak Ada	100	97,5	102,56%	577.456.000	570.833.720	98,85	6,41	UMUM
		Jumlah Barang Milik Daerah yang sudah teradministrasi dengan baik	5	Barang	1	0	3	1											UMUM
		Jumlah Barang Milik Daerah	5	Jenis	1	1	1	1											UMUM
1.2.03.0001	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	33.000.000	32.942.100	99,82	0,18	UMUM
1.2.03.0002	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	0	0	1	0	1	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	39.551.000	39.523.500	99,93	0,07	UMUM
1.2.03.0003	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	0	0	1	0	1	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	62.059.500	61.706.500	99,43	0,57	UMUM
1.2.03.0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0	1	1	100,00	Tidak Ada	4	5	100,00%	36.975.000	36.962.000	99,96	0,04	UMUM
1.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	1	0	1	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	405.870.500	399.699.620	98,48	1,52	UMUM
1.01.01.2.05	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan2	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	90	%	90	103	104	100	99,35	110,39	Tidak Ada	100	95	104,58%	4.304.878.676	4.241.853.417	98,54	11,85	UMUM
		Jumlah Administrasi Kepegawaian	230	Pegawai	64	64	64	64											UMUM
		Jumlah Pegawai	255	Pegawai	64	64	64	64											UMUM
1.2.05.0001	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	1	5	240,00%	120.400.000	120.400.000	100,00	0,00	UMUM
1.2.05.0002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	0	1	1	100,00	Tidak Ada	2	5	60,00%	135.000.000	135.000.000	100,00	0,00	UMUM
1.2.05.0003	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	1	500	2,60%	3.765.918.676	3.713.330.607	98,60	1,40	UMUM
1.2.05.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	1	500	2,60%	101.080.000	99.805.200	98,74	1,26	UMUM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.2.05.0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	1	585	2,22%	17.350.000	17.290.000	99,65	0,35	UMUM
1.2.05.0009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	0	0	0	10	10	100,00	Tidak Ada	40	200	25,00%	165.130.000	156.027.610	94,49	5,51	UMUM
1.01.01.2.06	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan3	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	%	49	93	157	100	100,00	100,00	Tidak Ada	100	95	105,26%	10.683.276.000	10.643.069.163	99,62	0,38	UMUM
		Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi	####	minis	2896	5465	9224	5862	23447										UMUM
		Jumlah Administrasi Umum	####	minis	5862	5862	5862	5862	23447										UMUM
1.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,42	0,00	0,58	1,00	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	145.000.000	144.778.965	99,85	0,15	UMUM
1.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	Paket	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	429.400.000	403.515.000	93,97	6,03	UMUM
1.2.06.0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,29	0,00	0,71	1,00	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	461.953.000	460.297.550	99,64	0,36	UMUM
1.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,30	0,00	1,00	1,30	129,99	Tidak Ada	1	5	46,00%	215.000.000	214.984.000	99,99	30,00	UMUM
1.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,19	0,00	0,94	1,13	113,46	Tidak Ada	1	5	42,69%	205.680.000	194.278.500	94,46	19,00	UMUM
1.2.06.0008	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	laporan	0	0	0	30	30	100,00	Tidak Ada	50	250	32,00%	2.267.944.000	2.267.652.666	99,99	0,01	UMUM
1.2.06.0009	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1500	laporan	0	0	0	1500	1500	100,00	Tidak Ada	1500	7500	40,00%	6.785.544.000	6.784.880.982	99,99	0,01	UMUM
1.2.06.0010	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	0	0	1	0	1	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	172.755.000	172.681.500	99,96	0,04	UMUM
1.01.01.2.07	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan4	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	%	0	0	1	399	100,00	100,00	Tidak Ada	100	95	210,53%	582.400.000	582.347.500	99,99	0,01	UMUM
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	651	Barang	0	0	1	650	651										UMUM
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	651	Barang	163	163	163	163	651										UMUM
1.2.07.0002	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	0	0	1	0	1	100,00	Tidak Ada	3	25	16,00%	551.000.000	550.990.000	100,00	0,00	UMUM
1.2.07.0005	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	0	0	0	650	650	100,00	Tidak Ada	1	17	####	31.400.000	31.357.500	99,86	0,14	UMUM
1.01.01.2.08	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan5	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	0	200	0	199	100,00	100,00	Tidak Ada	100	95	105,26%	4.076.165.000	3.958.181.941	97,11	2,89	UMUM
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5083	laporan	6	2547	6	2524	5083										UMUM
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5083	laporan	1271	1271	1271	1271	5083										UMUM
1.2.08.0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	Lap	0	2541	0	2512	5053	100,00	Tidak Ada	3000	15000	53,69%	61.000.000	61.000.000	100,00	0,00	UMUM
1.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	12	60	40,00%	2.161.000.000	2.094.753.241	96,93	3,07	UMUM
1.2.08.0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	laporan	0	0	0	6	6	100,00	Tidak Ada	1	25	28,00%	1.174.165.000	1.122.850.000	95,63	4,37	UMUM
1.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	1	25	52,00%	680.000.000	679.578.700	99,94	0,06	UMUM
1.01.01.2.09	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan6	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	17	26	51	306	100	100,00	Tidak Ada	0	95	105,26%	2.208.271.500	2.146.400.307	97,20	2,80	UMUM
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	47	Unit	2	3	6	36											UMUM
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5083	laporan	1271	1271	1271	1271											UMUM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	1	2	6	25	34	100,00	Tidak Ada	3	100	37,00%	1.099.975.000	1.043.445.937	94,86	5,14	UMUM
1.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	0	0	0	11	11	100,00	Tidak Ada	0	50	22,00%	793.046.500	791.637.750	99,82	0,18	UMUM
1.2.09.0009	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	1	1	0	0	2	100,00	Tidak Ada	0	8	25,00%	315.250.000	311.316.620	98,75	1,25	UMUM
1.01.01.2.11	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100,00	Tidak Ada	100	95	105,26%	623.171.000	534.133.768	85,71	14,29	UMUM
		Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH yang terpenuhi	12	Plyn	3	3	3	3											UMUM
		Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KD dan WKDH yang direncanakan	12	Plyn	3	3	3	3											UMUM
1.2.11.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	ang/Bu	6	6	6	6	24	100,00	Tidak Ada	12	60	60,00%	207.831.000	160.833.768	77,39	22,61	UMUM
1.2.11.0003	Terlaksananya kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	Orang	0	0	0	0	0	0,00	Tidak Ada	1	20	5,00%	42.000.000	0	0,00	0,00	UMUM
1.2.11.0004	Tersedianya Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	ang/Bu	0	1	0	1	2	100,00	Tidak Ada	100	10	20,00%	373.340.000	373.300.000	99,99	0,01	UMUM
1.01.01.2.13	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi melalui Penilaian Mandiri	15	PD	0	5	5	5	15	100,00	-	0	75	20,00%	850.027.000	846.280.466	99,56	2,66	ORGANISASI
		Jumlah Analisis Jabatan Perangkat Daerah yang tepat fungsi	5	Anjab	0	0	0	5	5	100,00	-	0	30	16,67%					ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	7	PD	0	3	4	0	7	100,00	-	0	35	20,00%					ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6	PD	6	6	6	6	6	100,00	-	0	30	20,00%					ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	18	PD	0	20	0	0	20	111,11	-	0	90	22,22%					ORGANISASI
1.2.13.0001	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan pengelolaan kelembagaan	22	PD	0	0	20	2	22	100,00	-	0	5	440,00%	286.085.000	284.182.706	99,34	0,66	ORGANISASI
		Jumlah PD yang dilakukan pendampingan anjab	5	PD	0	0	0	5	5	100,00	0	0	1E-13	#####					ORGANISASI
1.2.13.0002	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Ketatalaksanaan	50	PD	50	0	0	0	50	100,00	-	0	5	#####	263.442.000	262.626.171	99,69	0,31	ORGANISASI
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Pendampingan	7	PD	0	3	4	0	7	100,00	0	0	0	#####					ORGANISASI
1.2.13.0003	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan SAKIP	50	PD	21	10	12	7	50	100,00	-	0	5	#####	300.500.000	299.471.589	99,66	0,34	ORGANISASI
		Jumlah PD yang terlibat dalam Pelaksanaan RB sebagai Leading Sector	6	PD	6	6	6	6	6	100,00	-	0	1E-13	#####					ORGANISASI
1.01.01.2.14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	30	45	70	51	196	98,00	Ada	0	750	26,13%	9.913.559.000	9.859.806.426	99,46	-1,37	PROKOPIM
	Meningkatnya Kualitas layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	230	Lyn	35	55	76	60	226	98,26	Ada	0	750	30,13%					PROKOPIM
	Meningkatnya layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	30	45	70	51	196	98,00	Ada	0	750	26,13%					PROKOPIM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.2.14.0001	Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1	Lap	0	0	0	1	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	5.259.324.000	5.209.247.026	99,05	0,95	PROKOPI
1.2.14.0002	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	Lap	0	0	0	1	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	937.739.000	937.192.800	99,94	0,06	PROKOPI
1.2.14.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	Lap	0	0	0	1	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	3.716.496.000	3.713.366.600	99,92	0,08	PROKOPI
4.01.02	Meningkatnya kebijakan Strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	%	110	130	97	77	103,64	103,64	KEGIAT	100	100	103,64%	58.903.637.844	57.674.914.757	97,91	5,73	ASISTEN PEM KESRA
		Jumlah Kebijakan dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	522	eratura	144	170	126	101											
		Jumlah Rumusan kebijakan pada Bagian Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan menjadi produk hukum	522	eratura	131	131	131	131											
4.01.02.2.01	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	62	%	0	0	0	214	54	86,44	KEGIAT	0	100	53,59%	676.613.900	674.366.616	99,67	5,35	TAPEM
		Jumlah administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang terselesaikan	207	Adm	0	0	0	179											TAPEM
		Jumlah batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	334	Adm	84	84	84	84											TAPEM
		Persentase Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	74	%	0	0	87	0	87	117,51	KEGIAT	0	100	86,96%					TAPEM
		Jumlah data Rupa bumi kecamatan yang dimutakhirkan	17	apora	0	0	5	0											TAPEM
		Jumlah data Rupa Bumi Kecamatan	23	apora	6	6	6	6											TAPEM
	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten	Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	90	%	400	0	0	0	100	111,11	KEGIAT	0	95	105,26%					TAPEM
		Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	24	OPD	27	0	0	0											TAPEM
		Jumlah OPD Menyusun LPPD	27	OPD	7	7	7	7											TAPEM
2.2.01.0001	Terfasilitasinya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	Dok	0	0	0	2	2	100,00	KEGIAT	0	10	20,00%	203.852.000	203.354.300	99,76	0,24	TAPEM
2.2.01.0002	Terfasilitasinya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	KEGIAT	0	5	20,00%	112.827.400	112.436.800	99,65	0,35	TAPEM
2.2.01.0003	Terfasilitassnya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Dok	1	0	0	0	1	100,00	KEGIAT	0	5	20,00%	359.934.500	358.575.516	99,62	0,38	TAPEM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.01.02.2.02	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	%	94	94	118	94	100,00	100,00	KEGIATAN	0	100	100,00%	57.053.380.844	55.864.000.723	97,92	2,08	KESRA
		Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	17	SK	4	4	5	4											KESRA
		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Rakyat	17	SK	4	4	4	4											KESRA
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100	%	100	100	100	100	100,00	100,00	KEGIATAN	0	100	100,00%					KESRA
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	4	Keg	1	1	1	1											KESRA
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang direncanakan	4	Keg	1	1	1	1											KESRA
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	100	%	200	67	67	67	100,00	100,00	KEGIATAN	0	100	100,00%					KESRA
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	6	Keg	3	1	1	1											KESRA
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat yang direncanakan	6	Keg	2	2	2	2											KESRA
2.2.02.0001	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	325	Dok	80	81	82	82	325	100,00	KEGIATAN	0	5	#####	56.338.853.844	55.151.213.723	97,89	2,11	KESRA
2.2.02.0002	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	101	25	25	25	26	25	101	100,00	KEGIATAN	1	5	#####	450.232.000	448.838.200	99,69	0,31	KESRA
2.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	2	Dok	0	1	0	1	2	100,00	KEGIATAN	1	4	75,00%	264.295.000	263.948.800	99,87	0,13	KESRA

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.01.02.2.03	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kebutuhan Masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan yang harmonis	70	%	0	83	80	106	67,30	96,15	KEGIAT	0	90	74,78%	974.106.100	937.709.045	96,26	-11,45	HUKUM
		Jumlah kebijakan yang harmonis	46	peraturan	0	5	8	18											HUKUM
		Jumlah Kebijakan yang dibuat	66	peraturan	9	6	10	17											HUKUM
		Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	90	%	109	101	71	49	82,13	91,25	KEGIAT	0	95	86,45%					HUKUM
		Jumlah produk hukum yang selesai disusun	720	peraturan	217	201	142	97											HUKUM
		Jumlah produk hukum yang di rancang	800	peraturan	200	200	200	200											HUKUM
		Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	90	%	53	80	133	80	86,67	96,30	KEGIAT	0	95	91,23%					HUKUM
		Jumlah fasilitas bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah	14	asilita	2	3	5	3											HUKUM
		Jumlah fasilitas bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi yang direncanakan pada Pemerintah Daerah	15	asilita	4	4	4	4											HUKUM
		Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	90	%	50	50	80	20	50	55,56	KEGIAT	0	95	52,63%					HUKUM
		Jumlah kegiatan publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	36	Keg.	5	5	8	2											HUKUM
		Jumlah kegiatan publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Yang seharusnya dilaksanakan	40	Keg.	10	10	10	10											HUKUM
2.2.03.0001	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800	Dok	177	201	142	98	618	77,25	KEGIAT	0	500	123,60%	465.526.500	442.144.723	94,98	-17,73	HUKUM
2.2.03.0002	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	10	Kasus	2	3	5	0	10	100,00	KEGIAT	0	100	10,00%	344.951.000	335.270.100	97,19	2,81	HUKUM
2.2.03.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	19	Dok	5	5	9	2	21	110,53	KEGIAT	0	5	420,00%	163.628.600	160.294.222	97,96	12,56	HUKUM
1.01.02.2.04	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	90	%	52	174	104	35	91,30	101,45	KEGIAT	0	26	351,17%	199.537.000	198.838.373	99,65	1,80	TAPEM
		Jumlah Kerjasama yang disetujui	21	kerjasm	3	10	6	2											TAPEM
		Jumlah Kerjasama yang direncanakan	23	kerjasm	6	6	6	6											TAPEM
2.2.04.0001	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama DalamNegeri	21	Dok	3	10	6	2	21	100,00	KEGIAT	0	25	84,00%	199.537.000	198.838.373	99,65	0,35	TAPEM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
4.01.03	Meningkatnya fasilitasi penerapan kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	%	133	133	67	67	100,00	100,00	KEGIAT	0	100	100,00%	3.800.159.900	3.764.281.618	99,06	0,94	ASISTEN EKBANG
		Jumlah rumusan Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	6	eratura	2	2	1	1											
		Jumlah Rumusan Kebijakan Strategis	6	eratura	2	2	2	2											
		Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%	133	133	0	133	100,00	100,00	KEGIAT	0	100	100,00%					
		Jumlah rumusan kebijakan strategis dibidang pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	15	eratura	5	5	0	5											
		Jumlah rumusan kebijakan strategis yang direncanakan menjadi produk hukum	15	eratura	4	4	4	4											
	Meningkatnya kualitas pemanfaatan kebijakan sumber daya alam	Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna	100	%	0	200	0	200	100	100,00	KEGIAT	0	100	100,00%					
		Jumlah Kebijakan dibidang sumber daya alam yang tepat guna	2	ebijaka	0	1	0	1											
		Jumlah Kebijakan sumber Daya alam yang dievaluasi	2	ebijaka	1	1	1	1											
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	100	0	100	100,00	KEGIAT	0	100	100,00%					
		Jumlah rumusan Kebijakan strategis dibidang barang dan jasa yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum Daerah	1	eratura	0	0	1	0											
		Jumlah rumusan Kebijakan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa	1	eratura	0	0	1	0											
4.01.03.2.01	Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	%	133	133	67	67	100	100,00	KEGIAT	0	100	100,00%	616.010.000	615.926.500	99,99	0,01	EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian	6	ebijaka	2	2	1	1											EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	6	ebijaka	2	2	2	2											EKBANG SDA
3.2.01.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	1	1	1	1	4	100,00	KEGIAT	0	20	20,00%	243.785.000	243.778.375	100,00	0,00	EKBANG SDA
3.2.01.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Dok	1	1	0	2	4	100,00	KEGIAT	0	100	4,00%	125.100.000	125.092.925	99,99	0,01	EKBANG SDA
3.2.01.0003	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	KEGIAT	0	20	5,00%	80.000.000	79.954.100	99,94	0,06	EKBANG SDA
3.2.01.0004	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	0	0	0	1	1	100,00	KEGIAT	0	100	1,00%	60.000.000	59.978.750	99,96	0,04	EKBANG SDA
3.2.01.0005	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	Dok	0	0	1	1	2	100,00	KEGIAT	0	100	2,00%	107.125.000	107.122.350	100,00	0,00	EKBANG SDA
4.01.03.2.02	Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	%	133	133	0	133	100,00	100,00	KEGIAT	0	100	100,00%	320.200.000	319.068.875	99,65	0,35	EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan	15	ebijaka	5	5	0	5											EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	15	ebijaka	4	4	4	4											EKBANG SDA
3.2.02.0001	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dok	1	1	1	1	4	100,00	KEGIAT	0	60	6,67%	50.000.000	49.815.000	99,63	0,37	EKBANG SDA
3.2.02.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Lap	1	1	1	1	4	100,00	KEGIAT	0	60	6,67%	97.000.000	96.849.800	99,85	0,15	EKBANG SDA

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
3.2.02.0003	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Dok	25	25	25	25	100	100,00	KEGIAT	0	100	100,00%	173.200.000	172.404.075	99,54	0,46	EKBANG SDA
3.01.03.2.03	Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif dan Efisien	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	80	%	100	100	100	100	100	125,00	KEGIAT	0	90	111,11%	2.592.994.900	2.558.452.393	98,67	7,58	PBJ
		Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilihan tender seleksi dan e-purchasing diproses UKPBJ)	59	Paket	16	31	21	11											PBJ
		Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilihan tender seleksi dan e-purchasing diusulkan kepada UKPBJ)	74	Paket	16	31	21	11											PBJ
		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	50	OPD	15	15	10	10	50	100,00	KEGIAT	0	250	20,00%					PBJ
		Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah,	20	100 Us	5	5	5	5	20	100,00	KEGIAT	0	100	20,00%					PBJ
			50	OPD	10	10	20	10	50	100,00	KEGIAT	0	250	20,00%					PBJ
3.2.03.0001	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	525	Dok	128	248	168	0	544	103,62	KEGIAT	0	2500	21,76%	1.380.489.800	1.359.990.016	98,52	5,10	PBJ
3.2.03.0002	Terkelolanya Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	78	Dok	8	31	19	20	78	100,00	KEGIAT	0	353	22,10%	583.755.100	575.392.595	98,57	1,43	PBJ
3.2.03.0003	Terlaksananya Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	Org	15	15	15	15	60	100,00	KEGIAT	0	250	24,00%	628.750.000	623.069.782	99,10	0,90	PBJ
3.01.03.2.04	Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	%	133	133	0	133	100	100,00	KEGIAT	0	100	100,00%	270.955.000	270.833.850	99,96	0,04	EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam	15	kebijaka	5	5	0	5											EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	15	kebijaka	4	4	4	4											EKBANG SDA
3.2.04.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dok	1	1	1	1	4	100,00	KEGIAT	0	25	16,00%	80.000.000	79.942.250	99,93	0,07	EKBANG SDA
3.2.04.0002	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	Dok	0	1	0	1	2	100,00	KEGIAT	0	10	20,00%	100.000.000	99.936.600	99,94	0,06	EKBANG SDA
3.2.04.0003	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	Dok	0	1	0	1	2	100,00	KEGIAT	0	10	20,00%	90.955.000	90.955.000	100,00	0,00	EKBANG SDA
RATA-RATA/ TOTAL										98,65									

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Realisasi-Kinerja-SetdaKH>

Warna:



Mencapai Target/ menjadi bahan evaluasi



Tidak Mencapai Target

Tidak mencapai target (<85%). Capaian kinerja triwulan I minimal <15%, triwulan II minimal <40%, triwulan III minimal <60%, dan triwulan IV minimal <85% dan Maksimal 130%

Capaian Akhir RENSTRA pada Tahun 1 minimal 10%, Tahun 2 minimal 30%, Tahun 3 minimal 50%, Tahun 4 minimal 70% Tahun 5 minimal 90% dan Maksimal 130%

Putussibau, Januari 2025
 Sekretaris Daerah
 Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. H. Mohd. Zaini, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650910 199303 1 011

Foto-Foto





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,

Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

DAFTAR HADIR


Hari/ Tanggal : Selasa, 4 Februari 2025

Pukul : 09:45 WIB

Tempat : Ruang Rapat Bupati KH

Agenda : RAPAT EVALUASI KINERJA TRIMULAH I TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Mond. Zaini	SEKDA	1	2
2	Isaiah	Ass 1		
3	Triusri	Ass 2	3	4
4	Yovinus Riddy	Kabag Hukum		
5	Elias Kinson	Kabag Keem	5	6
6	Hermans .S	Kabag Taper		
7	Andreas Ariandesa	Kabag Protokol	7	8
8	Hendikus Han	Panmang Pan Uti		
9	X. Sirta	Kabag	9	10
10	Iwan Setia	Ass		
11	Wahid Fathori J.	Kabag PBS	11	12
12	Maria Yeni Murti	Staf		
13	Sipta Savitriani	- II -	13	14
14	M. Rahm	- II -		
15	Luisa Puspita R.	Staf	15	16
16	Viloria Laudra A	Staf		
17	Lily Pebrianti	Staf	17	18
18	Supriamus Herj	—		
19	A. Farhan	Kabag Peran	19	20
20	Adrianus	Irwanto		

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
21	fransiska yss	staf perkau	21	22
22				
23				
24			23	24
25			25	26
26				
27			27	28
28				
29			29	30
30				
31			31	32
32				
33			33	34
34				
35			35	36
36				
37			37	38
38				
39			39	40
40				
41			41	42
42				
43			43	44
44				
45			45	46
46				



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Nomor : 900/334/SETDA/PERKEU

Putussibau, **23** Januari 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (Dua) Lembar

Hal : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV
Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

di

Putussibau

Dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Triwulan IV pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 4 Februari 2025

Waktu : 08.30 WIB-selesai

Tempat : Ruang Rapat Bupati

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

Adapun yang menjadi Bahan Evaluasi dapat dilihat pada Link: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja> pada Triwulan IV (terlampir). Mohon setiap bagian menyiapkan tanggapan berdasarkan hasil monitoring tersebut yang tidak mencapai target serta melebihi target yang ditandai dengan warna kuning dan warna merah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah,

Mohd. Zaini

Daftar Penerima Surat

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
7. Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN II SURAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR: 900/334/SETDA/PERKEU
 TANGGAL: 23 JANUARI 2026
 PERIHAL: RAPAT EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

MONITORING KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN IV TAHUN 2024

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Realisasi-Kinerja-SetdaKH>

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
4.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	redika	B	B	B	B	B	87,50	Ada	CC	A	77,78%	111.585.237.920	109.595.242.700	98,22	-5,86	SEKDA
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	3,3	Nilai	0	0	0	2,67	2,671	80,93	Ada	2,6708	3,8	70,28%					SEKDA
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	80,8	Nilai	0	0	0	88	88	108,64	Ada	83,84	81	108,37%					SEKDA
4.01.01	Meningkatnya kebijakan strategis di bidang administrasi umum	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	%	100	100	100	100	100	100,00	KEGIAT	100	100	100,00%	48.881.440.176	48.156.046.325	98,52	1,48	ASISTEN ADUM
		Jumlah Kebijakan bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	12	Bulan	3	3	3	3											
		Jumlah Kebijakan administrasi umum yang direncanakan menjadi produk hukum	12	Bulan	3	3	3	3											
4.01.01.2.01	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	%	76	65	65	162	91,89	91,89	Ada	100	100	91,89%	837.152.000	836.421.487	99,91	-8,02	PERKEU
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman teknis	37	Dok	7	6	6	15											PERKEU
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	37	Dok	9	9	9	9											PERKEU
1.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	0	1	0	1	2	100,00	Ada	2	10	40,00%	544.904.500	544.189.987	99,87	0,13	PERKEU
1.2.01.0002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok	0	0	1	0	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	43.164.500	43.164.500	100,00	0,00	PERKEU
1.2.01.0003	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dok	0	0	1	0	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	37.607.000	37.607.000	100,00	0,00	PERKEU
1.2.01.0004	Tersedianya Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	32.784.000	32.775.000	99,97	0,03	PERKEU
1.2.01.0005	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	27.938.000	27.938.000	100,00	0,00	PERKEU
1.2.01.0006	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Lap	1	0	0	4	5	100,00	Ada	4	25	36,00%	120.439.000	120.439.000	100,00	0,00	PERKEU
1.2.01.0007	Terlaksananya Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	Lap	0	0	0	1	1	25,00	Ada	1	5	40,00%	30.315.000	30.308.000	99,98	-74,98	PERKEU
4.01.01.2.02	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%	25	25	25	25	100,00	100,00	0	100	100	100,00%	14.225.084.000	13.936.718.130	97,97	2,03	PERKEU
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1	Dok	0	0	0	0											PERKEU
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	1	Dok	0	0	0	0											PERKEU

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.2.02.0001	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	3	3	3	3	12	100,00	Ada	12	60	40,00%	12.791.426.000	12.547.178.920	98,09	1,91	PERKEU
1.2.02.0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	0	1	5	40,00%	214.714.000	214.430.360	99,87	0,13	PERKEU
1.2.02.0003	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	0	1	5	40,00%	552.040.000	509.930.000	92,37	7,63	PERKEU
1.2.02.0004	Tersedianya Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	0	1	5	40,00%	45.333.000	45.329.000	99,99	0,01	PERKEU
1.2.02.0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	0	0	0	1	100,00	0	1	5	40,00%	55.527.000	55.527.000	100,00	0,00	PERKEU
1.2.02.0006	Tersedianya Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	Dok	0	1	0	0	1	100,00	0	1	5	40,00%	516.344.000	514.623.800	99,67	0,33	PERKEU
1.2.02.0007	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Lap	1	1	1	1	4	100,00	Ada	4	20	40,00%	37.862.000	37.862.000	100,00	0,00	PERKEU
1.2.02.0008	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	0	1	5	40,00%	11.838.000	11.837.050	99,99	0,01	PERKEU
1.01.01.2.03	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan1	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	%	80	0	240	80	100	105,26	Tidak Ada	100	97,5	102,56%	577.456.000	570.833.720	98,85	6,41	UMUM
		Jumlah Barang Milik Daerah yang sudah teradministrasi dengan baik	5	Barang	1	0	3	1											UMUM
		Jumlah Barang Milik Daerah	5	Jenis	1	1	1	1											UMUM
1.2.03.0001	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	33.000.000	32.942.100	99,82	0,18	UMUM
1.2.03.0002	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	0	0	1	0	1	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	39.551.000	39.523.500	99,93	0,07	UMUM
1.2.03.0003	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	0	0	1	0	1	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	62.059.500	61.706.500	99,43	0,57	UMUM
1.2.03.0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0	1	1	100,00	Tidak Ada	4	5	100,00%	36.975.000	36.962.000	99,96	0,04	UMUM
1.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	1	0	1	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	405.870.500	399.699.620	98,48	1,52	UMUM
1.01.01.2.05	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan2	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	90	%	90	103	104	100	99,35	110,39	Tidak Ada	100	95	104,58%	4.304.878.676	4.241.853.417	98,54	11,85	UMUM
		Jumlah Administrasi Kepegawaian	230	Pegawai	64	64	64	64											UMUM
		Jumlah Pegawai	255	Pegawai	64	64	64	64											UMUM
1.2.05.0001	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	1	5	240,00%	120.400.000	120.400.000	100,00	0,00	UMUM
1.2.05.0002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	0	1	1	100,00	Tidak Ada	2	5	60,00%	135.000.000	135.000.000	100,00	0,00	UMUM
1.2.05.0003	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	1	500	2,60%	3.765.918.676	3.713.330.607	98,60	1,40	UMUM
1.2.05.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	1	500	2,60%	101.080.000	99.805.200	98,74	1,26	UMUM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.2.05.0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	1	585	2,22%	17.350.000	17.290.000	99,65	0,35	UMUM
1.2.05.0009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	0	0	0	10	10	100,00	Tidak Ada	40	200	25,00%	165.130.000	156.027.610	94,49	5,51	UMUM
1.01.01.2.06	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan3	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	%	49	93	157	100	100,00	100,00	Tidak Ada	100	95	105,26%	10.683.276.000	10.643.069.163	99,62	0,38	UMUM
		Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi	####	minis	2896	5465	9224	5862	23447										UMUM
		Jumlah Administrasi Umum	####	minis	5862	5862	5862	5862	23447										UMUM
1.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,42	0,00	0,58	1,00	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	145.000.000	144.778.965	99,85	0,15	UMUM
1.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	Paket	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	429.400.000	403.515.000	93,97	6,03	UMUM
1.2.06.0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,29	0,00	0,71	1,00	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	461.953.000	460.297.550	99,64	0,36	UMUM
1.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,30	0,00	1,00	1,30	129,99	Tidak Ada	1	5	46,00%	215.000.000	214.984.000	99,99	30,00	UMUM
1.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,19	0,00	0,94	1,13	113,46	Tidak Ada	1	5	42,69%	205.680.000	194.278.500	94,46	19,00	UMUM
1.2.06.0008	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	laporan	0	0	0	30	30	100,00	Tidak Ada	50	250	32,00%	2.267.944.000	2.267.652.666	99,99	0,01	UMUM
1.2.06.0009	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1500	laporan	0	0	0	1500	1500	100,00	Tidak Ada	1500	7500	40,00%	6.785.544.000	6.784.880.982	99,99	0,01	UMUM
1.2.06.0010	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	0	0	1	0	1	100,00	Tidak Ada	1	5	40,00%	172.755.000	172.681.500	99,96	0,04	UMUM
1.01.01.2.07	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan4	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	%	0	0	1	399	100,00	100,00	Tidak Ada	100	95	210,53%	582.400.000	582.347.500	99,99	0,01	UMUM
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	651	Barang	0	0	1	650	651										UMUM
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	651	Barang	163	163	163	163	651										UMUM
1.2.07.0002	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	0	0	1	0	1	100,00	Tidak Ada	3	25	16,00%	551.000.000	550.990.000	100,00	0,00	UMUM
1.2.07.0005	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	0	0	0	650	650	100,00	Tidak Ada	1	17	####	31.400.000	31.357.500	99,86	0,14	UMUM
1.01.01.2.08	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan5	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	0	200	0	199	100,00	100,00	Tidak Ada	100	95	105,26%	4.076.165.000	3.958.181.941	97,11	2,89	UMUM
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5083	laporan	6	2547	6	2524	5083										UMUM
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5083	laporan	1271	1271	1271	1271	5083										UMUM
1.2.08.0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	Lap	0	2541	0	2512	5053	100,00	Tidak Ada	3000	15000	53,69%	61.000.000	61.000.000	100,00	0,00	UMUM
1.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	12	60	40,00%	2.161.000.000	2.094.753.241	96,93	3,07	UMUM
1.2.08.0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	laporan	0	0	0	6	6	100,00	Tidak Ada	1	25	28,00%	1.174.165.000	1.122.850.000	95,63	4,37	UMUM
1.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	3	3	3	3	12	100,00	Tidak Ada	1	25	52,00%	680.000.000	679.578.700	99,94	0,06	UMUM
1.01.01.2.09	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan6	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	17	26	51	306	100	100,00	Tidak Ada	0	95	105,26%	2.208.271.500	2.146.400.307	97,20	2,80	UMUM
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	47	Unit	2	3	6	36											UMUM
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5083	laporan	1271	1271	1271	1271											UMUM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	1	2	6	25	34	100,00	Tidak Ada	3	100	37,00%	1.099.975.000	1.043.445.937	94,86	5,14	UMUM
1.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	0	0	0	11	11	100,00	Tidak Ada	0	50	22,00%	793.046.500	791.637.750	99,82	0,18	UMUM
1.2.09.0009	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	1	1	0	0	2	100,00	Tidak Ada	0	8	25,00%	315.250.000	311.316.620	98,75	1,25	UMUM
1.01.01.2.11	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100,00	Tidak Ada	100	95	105,26%	623.171.000	534.133.768	85,71	14,29	UMUM
		Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH yang terpenuhi	12	Plyn	3	3	3	3											UMUM
		Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KD dan WKDH yang direncanakan	12	Plyn	3	3	3	3											UMUM
1.2.11.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	ang/Bu	6	6	6	6	24	100,00	Tidak Ada	12	60	60,00%	207.831.000	160.833.768	77,39	22,61	UMUM
1.2.11.0003	Terlaksananya kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	Orang	0	0	0	0	0	0,00	Tidak Ada	1	20	5,00%	42.000.000	0	0,00	0,00	UMUM
1.2.11.0004	Tersedianya Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	ang/Bu	0	1	0	1	2	100,00	Tidak Ada	100	10	20,00%	373.340.000	373.300.000	99,99	0,01	UMUM
1.01.01.2.13	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi melalui Penilaian Mandiri	15	PD	0	5	5	5	15	100,00	-	0	75	20,00%	850.027.000	846.280.466	99,56	2,66	ORGANISASI
		Jumlah Analisis Jabatan Perangkat Daerah yang tepat fungsi	5	Anjab	0	0	0	5	5	100,00	-	0	30	16,67%					ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	7	PD	0	3	4	0	7	100,00	-	0	35	20,00%					ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6	PD	6	6	6	6	6	100,00	-	0	30	20,00%					ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	18	PD	0	20	0	0	20	111,11	-	0	90	22,22%					ORGANISASI
1.2.13.0001	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan pengelolaan kelembagaan	22	PD	0	0	20	2	22	100,00	-	0	5	440,00%	286.085.000	284.182.706	99,34	0,66	ORGANISASI
		Jumlah PD yang dilakukan pendampingan anjab	5	PD	0	0	0	5	5	100,00	0	0	1E-13	#####					ORGANISASI
1.2.13.0002	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Ketatalaksanaan	50	PD	50	0	0	0	50	100,00	-	0	5	#####	263.442.000	262.626.171	99,69	0,31	ORGANISASI
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Pendampingan	7	PD	0	3	4	0	7	100,00	0	0	0	#####					ORGANISASI
1.2.13.0003	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan SAKIP	50	PD	21	10	12	7	50	100,00	-	0	5	#####	300.500.000	299.471.589	99,66	0,34	ORGANISASI
		Jumlah PD yang terlibat dalam Pelaksanaan RB sebagai Leading Sector	6	PD	6	6	6	6	6	100,00	-	0	1E-13	#####					ORGANISASI
1.01.01.2.14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	30	45	70	51	196	98,00	Ada	0	750	26,13%	9.913.559.000	9.859.806.426	99,46	-1,37	PROKOPIM
	Meningkatnya Kualitas layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	230	Lyn	35	55	76	60	226	98,26	Ada	0	750	30,13%					PROKOPIM
	Meningkatnya layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	30	45	70	51	196	98,00	Ada	0	750	26,13%					PROKOPIM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.2.14.0001	Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1	Lap	0	0	0	1	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	5.259.324.000	5.209.247.026	99,05	0,95	PROKOPI
1.2.14.0002	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	Lap	0	0	0	1	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	937.739.000	937.192.800	99,94	0,06	PROKOPI
1.2.14.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	Lap	0	0	0	1	1	100,00	Ada	1	5	40,00%	3.716.496.000	3.713.366.600	99,92	0,08	PROKOPI
4.01.02	Meningkatnya kebijakan Strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	%	110	130	97	77	103,64	103,64	KEGIAT	100	100	103,64%	58.903.637.844	57.674.914.757	97,91	5,73	ASISTEN PEM KESRA
		Jumlah Kebijakan dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	522	eratura	144	170	126	101											
		Jumlah Rumusan kebijakan pada Bagian Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan menjadi produk hukum	522	eratura	131	131	131	131											
4.01.02.2.01	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	62	%	0	0	0	214	54	86,44	KEGIAT	0	100	53,59%	676.613.900	674.366.616	99,67	5,35	TAPEM
		Jumlah administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang terselesaikan	207	Adm	0	0	0	179											TAPEM
		Jumlah batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	334	Adm	84	84	84	84											TAPEM
		Persentase Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	74	%	0	0	87	0	87	117,51	KEGIAT	0	100	86,96%					TAPEM
		Jumlah data Rupa bumi kecamatan yang dimutakhirkan	17	apora	0	0	5	0											TAPEM
		Jumlah data Rupa Bumi Kecamatan	23	apora	6	6	6	6											TAPEM
	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten	Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	90	%	400	0	0	0	100	111,11	KEGIAT	0	95	105,26%					TAPEM
		Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	24	OPD	27	0	0	0											TAPEM
		Jumlah OPD Menyusun LPPD	27	OPD	7	7	7	7											TAPEM
2.2.01.0001	Terfasilitasinya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	Dok	0	0	0	2	2	100,00	KEGIAT	0	10	20,00%	203.852.000	203.354.300	99,76	0,24	TAPEM
2.2.01.0002	Terfasilitasinya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00	KEGIAT	0	5	20,00%	112.827.400	112.436.800	99,65	0,35	TAPEM
2.2.01.0003	Terfasilitassnya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Dok	1	0	0	0	1	100,00	KEGIAT	0	5	20,00%	359.934.500	358.575.516	99,62	0,38	TAPEM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.01.02.2.02	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	%	94	94	118	94	100,00	100,00	KEGIATAN	0	100	100,00%	57.053.380.844	55.864.000.723	97,92	2,08	KESRA
		Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	17	SK	4	4	5	4											KESRA
		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Rakyat	17	SK	4	4	4	4											KESRA
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100	%	100	100	100	100	100,00	100,00	KEGIATAN	0	100	100,00%					KESRA
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	4	Keg	1	1	1	1											KESRA
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang direncanakan	4	Keg	1	1	1	1											KESRA
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	100	%	200	67	67	67	100,00	100,00	KEGIATAN	0	100	100,00%					KESRA
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	6	Keg	3	1	1	1											KESRA
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat yang direncanakan	6	Keg	2	2	2	2											KESRA
2.2.02.0001	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	325	Dok	80	81	82	82	325	100,00	KEGIATAN	0	5	#####	56.338.853.844	55.151.213.723	97,89	2,11	KESRA
2.2.02.0002	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	101	25	25	25	26	25	101	100,00	KEGIATAN	1	5	#####	450.232.000	448.838.200	99,69	0,31	KESRA
2.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	2	Dok	0	1	0	1	2	100,00	KEGIATAN	1	4	75,00%	264.295.000	263.948.800	99,87	0,13	KESRA

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
1.01.02.2.03	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kebutuhan Masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan yang harmonis	70	%	0	83	80	106	67,30	96,15	KEGIAT	0	90	74,78%	974.106.100	937.709.045	96,26	-11,45	HUKUM
		Jumlah kebijakan yang harmonis	46	peraturan	0	5	8	18											HUKUM
		Jumlah Kebijakan yang dibuat	66	peraturan	9	6	10	17											HUKUM
		Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	90	%	109	101	71	49	82,13	91,25	KEGIAT	0	95	86,45%					HUKUM
		Jumlah produk hukum yang selesai disusun	720	peraturan	217	201	142	97											HUKUM
		Jumlah produk hukum yang di rancang	800	peraturan	200	200	200	200											HUKUM
		Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	90	%	53	80	133	80	86,67	96,30	KEGIAT	0	95	91,23%					HUKUM
		Jumlah fasilitas bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah	14	asilita	2	3	5	3											HUKUM
		Jumlah fasilitas bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi yang direncanakan pada Pemerintah Daerah	15	asilita	4	4	4	4											HUKUM
		Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	90	%	50	50	80	20	50	55,56	KEGIAT	0	95	52,63%					HUKUM
		Jumlah kegiatan publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangn yang dilaksanakan	36	Keg.	5	5	8	2											HUKUM
		Jumlah kegiatan publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangn Yang seharusnya dilaksanakan	40	Keg.	10	10	10	10											HUKUM
2.2.03.0001	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800	Dok	177	201	142	98	618	77,25	KEGIAT	0	500	123,60%	465.526.500	442.144.723	94,98	-17,73	HUKUM
2.2.03.0002	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	10	Kasus	2	3	5	0	10	100,00	KEGIAT	0	100	10,00%	344.951.000	335.270.100	97,19	2,81	HUKUM
2.2.03.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	19	Dok	5	5	9	2	21	110,53	KEGIAT	0	5	420,00%	163.628.600	160.294.222	97,96	12,56	HUKUM
1.01.02.2.04	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	90	%	52	174	104	35	91,30	101,45	KEGIAT	0	26	351,17%	199.537.000	198.838.373	99,65	1,80	TAPEM
		Jumlah Kerjasama yang disetujui	21	kerjasm	3	10	6	2											TAPEM
		Jumlah Kerjasama yang direncanakan	23	kerjasm	6	6	6	6											TAPEM
2.2.04.0001	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama DalamNegeri	21	Dok	3	10	6	2	21	100,00	KEGIAT	0	25	84,00%	199.537.000	198.838.373	99,65	0,35	TAPEM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
4.01.03	Meningkatnya fasilitasi penerapan kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	%	133	133	67	67	100,00	100,00%	KEGIATAN	0	100	100,00%	3.800.159.900	3.764.281.618	99,06	0,94	ASISTEN EKBANG
		Jumlah rumusan Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	6	peraturan	2	2	1	1											
		Jumlah Rumusan Kebijakan Strategis	6	peraturan	2	2	2	2											
		Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%	133	133	0	133	100,00	100,00%	KEGIATAN	0	100	100,00%					
		Jumlah rumusan kebijakan strategis dibidang pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	15	peraturan	5	5	0	5											
		Jumlah rumusan kebijakan strategis yang direncanakan menjadi produk hukum	15	peraturan	4	4	4	4											
	Meningkatnya kualitas pemanfaatan kebijakan sumber daya alam	Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna	100	%	0	200	0	200	100	100,00%	KEGIATAN	0	100	100,00%					
		Jumlah Kebijakan dibidang sumber daya alam yang tepat guna	2	kebijakan	0	1	0	1											
		Jumlah Kebijakan sumber Daya alam yang dievaluasi	2	kebijakan	1	1	1	1											
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	100	0	100	100,00%	KEGIATAN	0	100	100,00%					
		Jumlah rumusan Kebijakan strategis dibidang barang dan jasa yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum Daerah	1	peraturan	0	0	1	0											
		Jumlah rumusan Kebijakan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa	1	peraturan	0	0	1	0											
4.01.03.2.01	Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	%	133	133	67	67	100	100,00%	KEGIATAN	0	100	100,00%	616.010.000	615.926.500	99,99	0,01	EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian	6	kebijakan	2	2	1	1											EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	6	kebijakan	2	2	2	2											EKBANG SDA
3.2.01.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	1	1	1	1	4	100,00%	KEGIATAN	0	20	20,00%	243.785.000	243.778.375	100,00	0,00	EKBANG SDA
3.2.01.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Dok	1	1	0	2	4	100,00%	KEGIATAN	0	100	4,00%	125.100.000	125.092.925	99,99	0,01	EKBANG SDA
3.2.01.0003	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	Dok	0	0	0	1	1	100,00%	KEGIATAN	0	20	5,00%	80.000.000	79.954.100	99,94	0,06	EKBANG SDA
3.2.01.0004	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	0	0	0	1	1	100,00%	KEGIATAN	0	100	1,00%	60.000.000	59.978.750	99,96	0,04	EKBANG SDA
3.2.01.0005	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	Dok	0	0	1	1	2	100,00%	KEGIATAN	0	100	2,00%	107.125.000	107.122.350	100,00	0,00	EKBANG SDA
4.01.03.2.02	Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	%	133	133	0	133	100,00	100,00%	KEGIATAN	0	100	100,00%	320.200.000	319.068.875	99,65	0,35	EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan	15	kebijakan	5	5	0	5											EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	15	kebijakan	4	4	4	4											EKBANG SDA
3.2.02.0001	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dok	1	1	1	1	4	100,00%	KEGIATAN	0	60	6,67%	50.000.000	49.815.000	99,63	0,37	EKBANG SDA
3.2.02.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Lap	1	1	1	1	4	100,00%	KEGIATAN	0	60	6,67%	97.000.000	96.849.800	99,85	0,15	EKBANG SDA

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Desember	%		
3.2.02.0003	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Dok	25	25	25	25	100	100,00	KEGIAT	0	100	100,00%	173.200.000	172.404.075	99,54	0,46	EKBANG SDA
3.01.03.2.03	Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif dan Efisien	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	80	%	100	100	100	100	100	125,00	KEGIAT	0	90	111,11%	2.592.994.900	2.558.452.393	98,67	7,58	PBJ
		Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilihan tender seleksi dan e-purchasing diproses UKPBJ)	59	Paket	16	31	21	11											PBJ
		Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilihan tender seleksi dan e-purchasing diusulkan kepada UKPBJ)	74	Paket	16	31	21	11											PBJ
		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	50	OPD	15	15	10	10	50	100,00	KEGIAT	0	250	20,00%					PBJ
		Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah,	20	100 Us	5	5	5	5	20	100,00	KEGIAT	0	100	20,00%					PBJ
			50	OPD	10	10	20	10	50	100,00	KEGIAT	0	250	20,00%					PBJ
3.2.03.0001	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	525	Dok	128	248	168	0	544	103,62	KEGIAT	0	2500	21,76%	1.380.489.800	1.359.990.016	98,52	5,10	PBJ
3.2.03.0002	Terkelolanya Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	78	Dok	8	31	19	20	78	100,00	KEGIAT	0	353	22,10%	583.755.100	575.392.595	98,57	1,43	PBJ
3.2.03.0003	Terlaksananya Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	Org	15	15	15	15	60	100,00	KEGIAT	0	250	24,00%	628.750.000	623.069.782	99,10	0,90	PBJ
3.01.03.2.04	Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	%	133	133	0	133	100	100,00	KEGIAT	0	100	100,00%	270.955.000	270.833.850	99,96	0,04	EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam	15	kebijaka	5	5	0	5											EKBANG SDA
		Jumlah rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	15	kebijaka	4	4	4	4											EKBANG SDA
3.2.04.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dok	1	1	1	1	4	100,00	KEGIAT	0	25	16,00%	80.000.000	79.942.250	99,93	0,07	EKBANG SDA
3.2.04.0002	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	Dok	0	1	0	1	2	100,00	KEGIAT	0	10	20,00%	100.000.000	99.936.600	99,94	0,06	EKBANG SDA
3.2.04.0003	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	Dok	0	1	0	1	2	100,00	KEGIAT	0	10	20,00%	90.955.000	90.955.000	100,00	0,00	EKBANG SDA
RATA-RATA/ TOTAL										98,65									

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Realisasi-Kinerja-SetdaKH>

Warna:



Mencapai Target/ menjadi bahan evaluasi



Tidak Mencapai Target

Tidak mencapai target (<85%). Capaian kinerja triwulan I minimal <15%, triwulan II minimal <40%, triwulan III minimal <60%, dan triwulan IV minimal <85% dan Maksimal 130%

Capaian Akhir RENSTRA pada Tahun 1 minimal 10%, Tahun 2 minimal 30%, Tahun 3 minimal 50%, Tahun 4 minimal 70% Tahun 5 minimal 90% dan Maksimal 130%

Putussibau, Januari 2025
 Sekretaris Daerah
 Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. H. Mohd. Zaini, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650910 199303 1 011